

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alhudori, 2017). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan riil perkapita penduduk atau masyarakat disebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan perbaikan sistem kelembagaan. Dalam buku Todaro (1997 : 17) dijelaskan bahwa pandangan baru mengenai pembangunan ekonomi adalah penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Kemiskinan masih merupakan permasalahan ekonomi yang sering dihadapi di dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan dengan orang banyak yang tidak mampu membiayai hidupnya secara layak namun juga berkaitan dengan perbandingan yang timpang antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan yang paling rendah. Menurut BPS (2017) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah

garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman makanan yang setara dengan 21000 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (Badan Pusat Statistik, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ditunjukkan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya sehari-hari yang diukur dari sisi pengeluaran. Todaro dan Smith (2003) dalam bukunya menyebutkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni : (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dan Smith (2003) juga menambahkan bahwa, setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata maka tingkat kemiskinan disuatu negara tersebut pasti akan tetap parah. Begitu pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan disuatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas. Sedangkan menurut Syamrilaode dalam Putri dan Yuliarmi (2013) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, diantaranya adalah : (1) produktivitas tenaga kerja rendah, (2) pendapatan rendah, (3) distribusi pendapatan yang belum merata, (4) kesempatan kerja sedikit, (5) kualitas sumberdaya alam yang rendah, (6) sedikitnya penggunaan teknologi, (7) tidak adanya motivasi untuk bekerja, (8) norma budaya, dan (9) pembangunan ekonomi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih

dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Reggi *dkk*, 2016).

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan seperti dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan lain-lain (Cahya Ninggrum & Natha, 2015). Selama ini, pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah telah gencar melakukan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Mustika, 2011). Mustika (2011) menyebutkan berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB) yang dimulai awal 1970-an. Begitu pula usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penduduk telah dilakukan melalui program transmigrasi, dimana program transmigrasi masih menjadi salah satu model pembangunan.

Berbagai penanggulangan kemiskinan yang lain juga telah dilakukan oleh pemerintah, anggaran yang besarpun telah digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017). Namun, BPS Jawa Barat (2017) menjelaskan bahwa, berbagai program tersebut akan menjadi tidak efektif manakala disatu sisi pemerintah pun mengeluarkan kebijakan

yang tidak pro dengan kemiskinan seperti kenaikan sejumlah harga barang-barang pokok, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik serta akses infrastruktur yang kadang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik dibidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Kondisi seperti ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota Negara Republik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 (Ribu jiwa)

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2012	2560,02	1861,46	4421,48
2013	2626,16	1756,49	4382,65
2014	2554,06	1684,96	4239,02
2015	2706,52	1779,13	4485,65
2016	2543,3	1624,81	4168,11
2017	2391,23	1383,18	3774,41

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat masih tergolong besar. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin desa dan kota dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, seperti tahun 2012 sebesar 4421,48 ribu jiwa turun menjadi 4382,65 ribu jiwa di tahun 2013. Begitu juga ditahun 2014 sebesar 4239,02 ribu jiwa yang turun sebesar 143,63 ribu jiwa dari tahun 2013. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa pada Bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di

Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen) dikarenakan terjadi kenaikan harga-harga pada barang kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, gula pasir dan lain sebagainya. Kondisi tersebut terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang terjadi kenaikan pada jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan pada saat itu peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). BPS juga menambahkan komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, telur, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi yang merupakan kebutuhan pangan sehari-hari. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 4168,11 ribu jiwa dari tahun sebelumnya sebesar 4485,65 ribu jiwa di tahun 2015. Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sebesar 317,54 ribu jiwa.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat periode Maret 2017 berada diperingkat 16 setelah Provinsi Jambi, dan berada diperingkat 2 setelah Provinsi Banten jika dibandingkan diantara Pulau Jawa. BPS menyebutkan, dalam kurun waktu satu tahun dari Maret 2016 – Maret 2017,

penduduk miskin Jawa Barat di daerah pedesaan berkurang 146,91 ribu jiwa, yaitu dari 1,73 juta jiwa menjadi 1,58 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan secara absolut mengalami kenaikan sebanyak 91,03 ribu jiwa, yaitu dari 2,5 juta jiwa menjadi 2,59 juta jiwa. Kemudian BPS menambahkan, secara umum, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar daripada daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin daerah pedesaan periode Maret 2017 sebesar 11,75 persen, sedangkan di perkotaan yaitu 7,52 persen. Hal tersebut salah satu penyebabnya yaitu karena akses dan infrastruktur yang belum memadai di daerah pedesaan. Selain itu juga karena kualitas sumber daya manusia di pedesaan masih lebih rendah dibandingkan di perkotaan.

Berdasarkan fenomena di atas, kemiskinan menjadi penting untuk dibahas dan dikaji ulang, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Barat agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan juga seberapa besar pengaruh dari jumlah penduduk miskin dalam proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ingin meneliti pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah ***“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah***

Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016 (Studi Kasus pada 26 Kabupaten/Kota)” .

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang dibahas terkait dengan kemiskinan, maka penulis membatasi permasalahan tersebut dengan variabel dependennya adalah Jumlah Penduduk Miskin, dan variabel independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Perkapita. Sedangkan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulisan ini sebagai acuan dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hal yang telah diteliti, dan mampu membandingkan teori yang diterima di lapangan maupun di bangku perkuliahan.

b) Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini untuk pengambilan kebijakan apa yang harus diterapkan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.